

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap perusahaan pada dasarnya didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan maksimal bagi perusahaannya serta memenuhi kepuasan tersendiri bagi stakeholder ataupun investor agar memberikan dampak positif dalam pengembangan kegiatan perusahaan agar lebih baik. Pada awalnya perusahaan hanya mengungkap informasi mengenai aspek keuangan. Akan tetapi, akibat dari aktivitas perusahaan tersebut, suatu perusahaan tidak bisa lepas dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Hal ini menyebabkan perusahaan dituntut untuk ikut berkontribusi dalam memenuhi keinginan masyarakat. Masyarakat berharap perusahaan mampu melakukan bisnis yang bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan dan aspek sosial. Untuk itu, selain berfokus pada pemaksimalan keuntungan, perusahaan juga harus memperhatikan pengaruh nyata terhadap suatu masalah mengenai risiko keberlanjutan (sustainable) terkait aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Sehingga, diperlukan konsep secara menyeluruh dengan bahasa yang lebih jelas dan mudah dimengerti. Konsep inilah yang dinamakan dengan Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report).

Sustainability Report diawali dari konsep yang diperkenalkan oleh John Elkington (1997) yang memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan konsep triple bottom line atau 3P (profit,

people, dan planet). Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Profit menekankan pada keuntungan yang maksimal harus memperhatikan aspek efisiensi biaya, reformasi birokrasi, hingga pembenahan dari segi manajemen internal. People merupakan stakeholder penting bagi perusahaan untuk peduli kepada masyarakat dengan memberikan berbagai program akomodatif dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Planet merupakan sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Hubungan dengan lingkungan adalah untuk mencapai Pembangunan berkelanjutan (sustainable development), maka saat ini Perusahaan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup di Tengah kegiatan produksinya. (John Elkington, 1994).

Penerbitan laporan keberlanjutan yang ada di Indonesia saat ini, hampir sebagian besar berdasarkan standar pengungkapan yang ada dalam Global Reporting Initiative (GRI). GRI merupakan salah satu organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1997 dan berpusat di Amsterdam, Belanda. Aktivitas utama dari GRI difokuskan kepada pencapaian transparansi dan pelaporan suatu perusahaan melalui pengembangan standar dan pedoman pengungkapan sustainability report. Menurut Global Reporting Initiative (GRI) sustainability report adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Di Indonesia sendiri pengungkapan Sustainability Report bukanlah sebuah laporan yang wajib pada setiap perusahaan namun masih bersifat sukarela (voluntary). Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan, laporan keberlanjutan ini menjadi sebuah hal yang wajib ada pada setiap perusahaan. Karena, pengungkapan Sustainability Report menunjukkan adanya kepedulian para pemangku kepentingan stakeholders dan para investor terhadap bidang ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Walaupun masih bersifat sukarela, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 menunjukkan bahwa perusahaan terdaftar di BEI yang telah menerbitkan Sustainability Report hanyalah sebanyak 49 perusahaan, atau hamper 9% dari perusahaan yang terdaftar di BEI. Sedangkan 91% tidak menerbitkan Sustainability Report.

Diantaranya yaitu pada sektor perbankan. Sektor perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian global. Di Indonesia, perbankan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional melalui penyaluran kredit, layanan keuangan, dan intermediasi dana. Di tengah era globalisasi dan tuntutan akan keberlanjutan, sektor perbankan didorong untuk tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Keberlanjutan dalam sektor perbankan mengacu pada praktik dan operasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Laporan keberlanjutan menunjukkan komitmen bank terhadap ESG, sehingga meningkatkan kepercayaan dan reputasi bank di mata investor, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko ESG, bank dapat meningkatkan stabilitas dan ketahanan jangka panjang. Selain itu,

bank dapat menemukan peluang baru dalam bisnis yang berkelanjutan. Dengan Semakin banyak bank di seluruh dunia yang mempublikasikan laporan keberlanjutan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mewajibkan bank untuk mempublikasikan laporan keberlanjutan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Bank, dan Perusahaan Efek.

Hal ini memberikan dorongan kepada sektor perbankan untuk dapat berkontribusi dalam pengungkapan Sustainability Report. Salah satunya pada Bank Mandiri. PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk telah menyalurkan total portofolio berkelanjutan atau sustainable portofolio sebesar Rp253 triliun atau tumbuh 24,9% dari total kredit perseroan hingga kuartal III-2023. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, pertumbuhan penyaluran portofolio tersebut mencerminkan komitmen perseroan terhadap prinsip lingkungan (environmental), sosial (social) dan tata kelola (ESG).

Dalam konferensi pers virtual yang diadakan pada Senin, Alexandra mengungkapkan bahwa Bank Mandiri telah menetapkan komitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada operasionalnya di tahun 2023 dan pada pembiayaan di tahun 2060. Ia juga menambahkan bahwa bank tersebut berupaya mendorong nasabah untuk bertransisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penyaluran kredit green financing.

Dari total portfolio berkelanjutan tersebut, Rp122 triliun di antaranya merupakan portfolio hijau sedangkan Rp131 triliun merupakan portfolio sosial yang disalurkan ke segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Alexandra menjelaskan, sebagai komitmen terhadap ESG, Bank Mandiri juga menyiapkan berbagai solusi keuangan berkelanjutan seperti pembiayaan hijau (green loan) sebesar Rp927 juta, sustainability linked-loan sebesar Rp2,1 triliun, pembiayaan transisi (transition loan) sebesar Rp1,1 triliun, dan pembiayaan sektor pertanian berkelanjutan sebesar Rp 97,9 triliun.

Dari aspek operasional, Bank Mandiri menerapkan operasional hijau melalui penggunaan 126 mobil elektrik (EV), instalasi stasiun pengisian (charging station), pemasangan 556 panel surya, serta memiliki gedung dengan sertifikasi green building, serta telah menjalankan 241 smart branch dan digitalisasi melalui Livin' by Mandiri dan Kopra.

Alexandra menyatakan bahwa dengan mengintegrasikan prinsip sustainable financing dalam penyaluran kredit, Bank Mandiri berharap dapat memperluas dampak positif bagi jutaan masyarakat Indonesia, termasuk untuk UMKM di sektor pertanian, energi terbarukan, transportasi bersih, dan kegiatan lainnya.

Bank Mandiri juga menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan ras dan gender dalam perusahaan dengan sebanyak 25% dari tim manajemen perseroan diisi oleh perempuan. Dalam komposisi pemimpin senior, 46% di antaranya merupakan perempuan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan perseroan konsisten mendukung transisi menuju Indonesia Net Zero Emission (NZE) 2060 yang menjadi komitmen

masyarakat global termasuk Indonesia. Untuk, itu, perseroan baru saja merilis Digital Carbon Tracking yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) melihat secara real-time jumlah karbon yang dihasilkan dan emisi yang berhasil dikurangi perseroan secara operasional. Selain itu, pembiayaan hijau atau green financing telah difokuskan pada sektor-sektor berkelanjutan, termasuk sektor perkebunan yang telah tersertifikasi ISPO atau RSPO, energi baru dan terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga hidro dan geothermal, serta transportasi dan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir.

<https://www.antaraneews.com/berita/3799254/bank-mandiri-telah-salurkan-portfolio-berkelanjutan-rp253-triliun>

Aspek sustainability sendiri sudah menjadi hal penting dan komitmen global untuk memastikan kelangsungan serta kualitas hidup manusia pada saat ini dan masa depan. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) perbankan di Indonesia telah mencapai 55,9 miliar dollar AS atau setara Rp 809,75 triliun pada 2021.

Setidaknya, hampir 50% bank di Indonesia menunjukkan peningkatan komitmen dalam penerapan sustainable finance. Jumlah ini mewakili 91% dari total aset pasar perbankan Indonesia. Berkat kinerja tersebut, Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara dalam tahap konsolidasi regulasi keuangan berkelanjutan pada 2021. Tak hanya itu, pembiayaan berkelanjutan juga menjadi salah satu dari tujuh topik prioritas di bidang keuangan yang akan diangkat pada Presidensi Group of Twenty (G20)

Indonesia. Isu tersebut terkait pengembangan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim. Pembahasan ini mencakup green finance facility, termasuk stimulus di bidang fiskal, guna mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pada dasarnya, sustainability tidak hanya mengenai kegiatan sosial, donasi, dan filantropi yang berkaitan dengan lingkungan. Lebih dari itu, sustainability juga mencakup profitabilitas perusahaan, inovasi, perubahan paradigma berpikir dan cara kerja, ketenagakerjaan, kualitas produk dan jasa, serta perlindungan pelanggan. Oleh sebab itu, prinsip keberlanjutan merupakan kunci strategi bisnis pada masa depan. Demi memuluskan strategi tersebut, seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi dalam mengimplementasikan kerangka kerja yang komprehensif dari kebijakan berkelanjutan nasional. Tak terkecuali, sektor perbankan. Dengan dukungan teknologi yang mumpuni, sektor perbankan memainkan peran penting dalam menyediakan sustainable finance. Sebagai salah satu pemain utama dalam sustainable finance global, Standard Chartered Bank turut berkomitmen mewujudkan hal tersebut. Untuk diketahui, Standard Chartered Bank telah memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial dalam kerangka kerjanya sejak 1997. Sejalan dengan komitmen tersebut, Standard Chartered Bank kini membatasi dukungan pembiayaan kepada bisnis yang tidak berdasarkan prinsip sustainable.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Standard Chartered Bank kini membatasi dukungan pembiayaan kepada bisnis yang tidak berdasarkan prinsip sustainable. Sebagai contoh, proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru atau perluasan yang sudah ada, eksplorasi wilayah Kutub Utara, penambangan asbes dan

batu bara, pembuatan atau distribusi senjata nuklir, serta pengembangan dan pembukaan lahan gambut, kawasan dengan nilai konservasi tinggi atau High Conservation Value (HCV), dan stok karbon tinggi atau High Stock Carbon (HCS). Standard Chartered Bank hanya akan memberikan layanan keuangan kepada nasabah dengan pendapatan yang bergantung pada batu bara termal kurang dari 5%. Hal ini sesuai dengan target pengurangan emisi karbon pada 2030 yang dicanangkan Standard Chartered Bank.

Komitmen Standard Chartered Bank dalam berbagai praktik terkait sustainable finance juga dilakukan bersamaan dengan transformasi digital dalam setiap lini bisnis dan operasionalnya. Transformasi digital tersebut diharapkan membawa dampak positif dalam memberikan pengalaman layanan yang lebih baik kepada klien melalui berbagai pilihan solusi keuangan dan kinerja teknologi yang mumpuni. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan transaksi keuangan nasabah berjalan secara aman dan nyaman. Sejumlah dukungan teknologi digital itu di antaranya adalah kehadiran fitur Online Mutual Fund dalam layanan online banking dan aplikasi SC Mobile. Fitur tersebut dapat membantu nasabah untuk melakukan transaksi investasi dengan mudah, seperti membeli, menjual, atau menukar (switching) reksa dana. Sementara itu, untuk transaksi obligasi, Standard Chartered Bank juga menawarkan fitur Retail Bonds Online yang telah tersemat di aplikasi SC Mobile. Guna membantu nasabah mencapai tujuan keuangan, SC Mobile juga dilengkapi dengan fitur SmartGoals. Standard Chartered Bank juga menyediakan penyaluran kredit secara digital melalui platform Beli Sekarang, Bayar Nanti atau

Buy Now, Pay Later (BNPL) ke segmen pasar ritel atau mass market. Selain itu, Standard Chartered Bank juga meluncurkan Straight2Bank Pay (S2B Pay).

Layanan ini membantu perusahaan-perusahaan meraih peluang dari ekonomi digital dengan melakukan penagihan dana melalui berbagai metode secara real-time. S2B Pay juga mendukung perdagangan digital lintas batas di seluruh saluran penjualan perusahaan, termasuk penjualan online (e-commerce), pembayaran digital, tautan pembayaran, penyajian tagihan, dan penagihan berbasis faktur. Selain menggulirkan solusi-solusi keuangan berbasis digital terkini, Standard Chartered Bank juga telah mengimplementasikan teknologi digital canggih, seperti robotik, machine learning, dan big data analytics. Dengan demikian, Standard Chartered Bank dapat mentransformasi model operasi bisnisnya menjadi lebih efisien dan efektif.

<https://biz.kompas.com/read/2021/12/17/144703928/menilik-peran-sektor-perbankan-dalam-pencapaian-prinsip-berkelanjutan-dengan>

Melihat dari beberapa bank yang melakukan kontribusi pada pengungkapan Sustainability Report, Perkembangan teknologi informasi yang cepat telah membawa kehidupan masyarakat dunia memasuki era baru yang sering disebut era revolusi industri 4.0. Pemanfaatan berbagai teknologi di bidang layanan keuangan telah membawa perubahan yang signifikan pada industri perbankan. Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital mendorong perbankan mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital.

Tuntutan digitalisasi perbankan diperkuat oleh berbagai faktor pendorong pengembangan digital bank di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan perekonomian yang berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi. Faktor pendorong tersebut tercermin dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu peluang digital (digital opportunity), perilaku digital (digital behavior), dan transaksi digital (digital transaction). Peluang digital antara lain meliputi potensi demografis, potensi ekonomi dan keuangan digital, potensi penetrasi penggunaan internet, serta potensi peningkatan konsumen. Perilaku digital di antaranya meliputi kepemilikan gawai dan penggunaan aplikasi mobile (mobile apps). Transaksi digital meliputi transaksi perdagangan online (e-commerce), transaksi digital banking, dan transaksi uang elektronik.

Di samping membawa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan, transformasi digital memunculkan tantangan yang perlu diwaspadai. Beberapa tantangan tersebut mencakup perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data, risiko investasi teknologi yang tidak sesuai dengan strategi bisnis, risiko penyalahgunaan teknologi artificial intelligence, risiko serangan siber, risiko alih daya, perlunya dukungan kesiapan tatanan institusi yang berorientasi digital, inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas, literasi keuangan digital yang masih rendah, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di Indonesia, dan dukungan kerangka regulasi.

Secara konsep, terdapat perbedaan antara bank digital dengan bank konvensional yang menyediakan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking. Bank digital umumnya dapat melakukan semua aktivitas perbankan mulai dari pembukaan akun, transfer, deposito, hingga penutupan akun melalui smartphone/perangkat elektronik tanpa perlu hadir secara fisik ke bank. Selain itu, perbedaan paling mendasar lainnya adalah bank digital umumnya tidak memiliki kantor fisik (selain kantor pusat) atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2021). Sementara itu, bank konvensional yang menyediakan layanan digital, umumnya belum mampu menyediakan semua layanannya secara digital. Selain itu, bank konvensional identik dengan jumlah kantor cabang yang sangat banyak.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774>

Setidaknya terdapat dua potensi dampak positif yang paling signifikan yang mungkin muncul akibat transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan. Pertama, meluasnya aksesibilitas perbankan. Kedua, meningkatkan daya saing perbankan Indonesia. Perbankan digital akan mampu meningkatkan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi perbankan sehingga akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Selain itu, Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Intermediasi keuangan perbankan tetap tumbuh positif dimana secara year-on-year, dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,62% pada bulan Agustus 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan sektor perbankan dapat mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa naik kelas melalui pembiayaan, termasuk dalam platform digital. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM minimal 30% pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, Pemerintah memerlukan dukungan dari semua pihak agar dapat terlaksana dengan baik. Dengan membaiknya permintaan Masyarakat, perbankan diminta untuk menyelaraskan lending appetite atau penyaluran kredit bagi dunia usaha guna memastikan dukungan yang cukup untuk sektor-sektor yang mendorong pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikan saat membuka Munas XI Perbarindo 2022 dan meluncurkan BPR e-Cash serta BPR DIGI secara virtual pada Rabu, 19 Oktober 2022.

Selain itu, bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sendiri telah banyak yang menasar kepada jenis kredit konsumsi serta UMKM. Hal ini berpotensi menjadi buffer di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Di tengah kinerja UMKM yang mulai bangkit seiring meredanya pandemi, kinerja BPR/BPRS juga diharapkan semakin terungkit.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara year-on-year pertumbuhan kredit BPR pada bulan Juli 2022 yakni sebesar 9% dengan tingkat non performing loan yang masih terjaga, demikian juga dengan kinerja BPR berdasarkan rasio keuangan. Peran strategis BPR/BPRS tersebut harus didukung oleh penguatan sinergi antara Pemerintah, otoritas keuangan, dan bank sentral agar

stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dan tata kelola bank menjadi lebih baik dalam memajukan sektor riil, termasuk UMKM.

Menko Airlangga menyatakan bahwa sektor keuangan perlu didorong untuk memanfaatkan momentum akselerasi digitalisasi, terutama setelah Covid-19. Ia menambahkan bahwa digitalisasi telah terbukti mampu menghasilkan layanan keuangan yang efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas. Ia juga mencatat bahwa 19 juta UMKM telah bergabung dalam ekosistem digital, dan ditargetkan akan ada 30 juta UMKM yang masuk ke ekosistem digital pada tahun 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi Perbarindo yang telah meluncurkan layanan berbasis digital yaitu BPR e-Cash dan BPR Digi pada bulan Maret lalu. Hal ini turut mendukung perkembangan ekonomi digital dan inklusivitas keuangan di Indonesia serta sejalan dengan perkembangan bisnis dan teknologi yang semakin dinamis sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Dalam jangka panjang, Indonesia memiliki target ekonomi untuk dapat tumbuh tinggi dan keluar dari middle income trap. Sektor keuangan termasuk BPR/BPRS diharapkan dapat berkontribusi melalui peningkatan literasi keuangan dan pendalaman pasar, serta akses pembiayaan ke seluruh masyarakat Indonesia.

Menko Airlangga berharap bahwa BPR e-Cash dapat meningkatkan layanan BPR dan BPRS bagi nasabah secara digital melalui smartphone, serta bahwa BPR Digi dapat memberikan kemudahan akses dan transaksi kepada para nasabah BPR atau BPR Syariah. Ia juga menambahkan bahwa komitmen tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing BPR dan BPRS di masa depan.

Direktur Pengawasan Bank OJK, Jasmi mengatakan, berdasarkan CP Digital banking tersebut, pengaturan digital banking terbagi menjadi dua. “Pertama digital branch, dan kedua, banking everywhere” ujarnya saat ditemui di acara yang sama. Berbagai aturan yang diterbitkan OJK ini diharapkan dapat mendukung proses evolusi digital banking.

<https://infobanknews.com/ojk-pengaturan-digital-banking-dibagi-dalam-2-tahap/>

Terdapat beberapa kasus yang terjadi terkait dengan pengaruh media sosial pada sektor perbankan. Diantaranya pada kasus Silicon Valley Bank (SVB). Saat sesuatu terjadi di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, orang kemudian terpanggil bergerak ketika muncul tagar #SaveKPK beberapa tahun lalu. Mereka kemudian berkumpul untuk menyatakan pendapat dan kemudian juga melakukan demonstrasi. Transmisi perasaan mudah terjadi di era [media sosial](#). Dalam waktu singkat kecemasan atau ketakutan terhadap sesuatu bisa membangkitkan orang untuk bergerak.

Kita beruntung memiliki pengalaman positif dalam pergerakan massa dengan menggunakan media sosial. Akan tetapi, berkaca dari kasus [Silicon Valley Bank](#) (SVB) di Amerika Serikat, maka kita perlu bersiap-siap ketika obrolan di grup percakapan dan kemudian diunggah di media sosial lainnya memunculkan kepanikan serta berlanjut pada krisis perbankan. Laporan awal menyebutkan, pemilik rekening menarik 42 miliar dollar AS dalam satu hari di Silicon Valley Bank. Mereka hanya meninggalkan 1 miliar dollar AS dalam saldo kas negatif. Penarikan yang mengejutkan ini terjadi dengan kecepatan yang dimungkinkan oleh perbankan digital dan kemungkinan besar sebagian didorong oleh kepanikan viral

yang menyebar di platform media sosial yang sebelumnya muncul di grup obrolan pribadi.

The Wall Street Journal melaporkan, pada hari menjelang keruntuhan bank, beberapa pemodal ventura terkemuka turun ke Twitter secara khusus dan menggunakan platform mereka untuk memperingatkan tentang situasi tersebut. Bahkan, terkadang mengetik dengan huruf besar semua. Beberapa investor mendesak para usaha rintisan untuk memikirkan kembali di mana mereka menyimpan uang. Pendiri dan CEO kemudian membagikan cuitan tentang situasi yang mengkhawatirkan di bank di kanal pribadi platform Slack. Kasus ini merupakan kasus pertama krisis perbankan yang diduga muncul karena penyebaran kepanikan melalui media sosial. “Ini adalah krisis bank pertama yang didorong oleh Twitter,” kata Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS Patrick McHenry di laman Bankingdive dalam sebuah pernyataan menyusul langkah-langkah luar biasa regulator untuk mengamankan semua simpanan di SVB. Upaya itu merupakan cara untuk membendung penularan kepanikan di kalangan nasabah.

Rumor dan potensi krisis perbankan membutuhkan beberapa hari hingga kemudian meledak. Kini, dengan adanya media sosial, maka dalam hitungan menit institusi keuangan yang dibangun beberapa tahun bisa kolaps. Sistem perbankan, regulator, dan pemerintah perlu bersiap menghadapi realitas baru ini dan mengalibrasi ulang alat-alat yang digunakan untuk memantau pemicu berikut dengan metriknya. Otoritas bisa saja bekerja sama dengan perusahaan media sosial agar platform memberi tahu fenomena yang tengah terjadi di media sosial, semisal kenaikan pembicaraan yang tidak wajar tentang sebuah bank atau krisis sebuah

bank. Dengan cara ini, otoritas bisa segera melakukan langkah pencegahan. Ada yang mengusulkan agar otoritas melarang unggahan tentang krisis perbankan. Akan tetapi, pendiri dan CEO Tusk Ventures Bradley Tusk di laman Fortune mengatakan, memantau volatilitas di platform media sosial tidaklah rumit atau mahal. Langkah seperti ini tidak memerlukan proses pembuatan peraturan yang ekstensif dan masuk akal. Lebih penting lagi, regulator harus menyadari bahwa dunia telah berubah dan perubahan terjadi pula di dalam industri keuangan.

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/24/media-sosial-jadi-biang-krisis-di-silicon-valley-bank>

Jika melihat gambar di atas, adanya suatu kesamaan peran baik bank maupun sosial media. Melihat dari definisinya, menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, “Bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”. Sedangkan sosial media dapat diartikan: media for social interaction, using highly accessible and scalable communication techniques (wikipedia).

Bukan hal yang mustahil setiap nasabah bank memiliki account seperti halnya facebook, bisa memilih investasi secara realtime dan melihat portofolionya serta bagi nasabah peminjam memiliki etalase virtual yang dapat memasarkan produk kesesama nasabah bank tersebut. Bagi bank, operational cost jauh berkurang sehingga bunga bagi peminjampun jauh lebih rendah. Di sini lah peran

bank dan sosial media tidak dapat dipisahkan lagi, menjadi lembaga intermediasi, bukan hanya jembatan bagi pihak surplus atau defisit tetapi juga jembatan antara pembeli dan penjual.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan untuk meneliti bagaimana pengaruh visibilitas media dan digital bank terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan dengan tata kelola sebagai variabel moderasi. Diantaranya visibilitas media tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Menurut (Moridu, 2020), digital banking secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun menurut (Tjendani et al., 2018), perbankan digital tidak memiliki implikasi yang signifikan terhadap kinerja modal intelektual di tahun yang sama karena masih dalam proses pengembangan. Moridu dan Tjendani sama-sama menunjukkan fakta bahwa perbankan digital masih dalam proses pengembangan. Visibilitas media dan digital bank tidak mempengaruhi bank dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. Visibilitas media dan digital bank mempengaruhi bank dalam pengungkapan laporan keberlanjutan ketika dimoderasi oleh tata Kelola (Bambang Subagyo, Etty Murwaningsari 2023).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, kasus, dan fenomena yang diambil oleh peneliti dan penelitian yang dilakukan sebelumnya didapat hasil yang tidak konsisten. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang memiliki judul **“Pengaruh Visibilitas Media dan Digital Bank Terhadap Pengungkapan Laporan Berkelanjutan dengan Tata Kelola sebagai Variabel Moderasi pada sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar**

**di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023”**. Dilakukannya penelitian ini, merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan (Bambang Subagyo, Ety Murwaningsari 2023) yang bertujuan untuk mengkaji ulang tentang penelitian mengenai pengaruh visibilitas media dan digital bank terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan dengan tata kelola sebagai variabel moderasi. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek pengaruh visibilitas media dan digital bank saja, tetapi juga menambahkan aspek tata kelola seperti dalam penelitian sebelumnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana Visibilitas Media pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
2. Bagaimana Digital Bank pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
3. Bagaimana Pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
4. Bagaimana Tata Kelola pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh Visibilitas Media dan Digital Bank terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan Sektor Keuangan

Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.

6. Seberapa besar pengaruh Visibilitas Media terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
7. Seberapa besar pengaruh Digital Bank terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
8. Seberapa besar pengaruh Tata Kelola dapat memoderasi hubungan antara Visibilitas media dengan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
9. Seberapa besar pengaruh Tata Kelola dapat memoderasi hubungan antara Digital Bank dengan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Visibilitas Media dan Digital Bank terhadap pengungkapan Laporan Berkenjutan (sustainability report) dengan Tata Kelola sebagai Variabel Moderasi. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Visibilitas Media pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui Digital Bank pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui Pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui Tata Kelola pada sektor keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Visibilitas Media dan Digital Bank terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan dengan Tata Kelola sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Visibilitas Media terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
7. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Digital Bank terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.

8. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Tata Kelola dapat memoderasi hubungan antara Visibilitas media dengan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
9. Untuk mengetahui pengaruh Tata Kelola dapat memoderasi hubungan antara Digital Bank dengan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris di bidang akuntansi keuangan, mengenai pengaruh visibilitas media dan digital bank terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan dengan tata Kelola sebagai variable moderasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan tambahan informasi, wawasan, serta referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Serta, peneliti berharap penelitian ini menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut agar dapat mengembangkan informasi yang dibutuhkan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi keuangan khususnya mengenai pengaruh visibilitas media dan digital bank terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan dengan tata kelola sebagai variable moderasi. Serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi perusahaan untuk memperhatikan permasalahan mengenai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, serta memaksimalkan nilai perusahaan.

#### **3. Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan riset untuk peneliti selanjutnya untuk mengembangkan informasi lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Financials subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Adapun penelitian ini dilakukan dengan memperoleh informasi dan pengambilan data melalui situs resmi Bursa efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs web resmi Perusahaan terkait. Waktu dan pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2024 hingga penelitian ini selesai.